

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” telah ditetapkan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan daerah. Saat diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, maka sistem pembangunan berubah dari otonomi pusat menjadi otonomi daerah. Melalui otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah langsung menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada (Setyowati, *et. al.*, 2016). Salah satu upaya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang transparans dan akuntabel adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan elemen penting dalam sebuah pemerintahan karena laporan keuangan ini menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan melalui informasi-informasi keuangan yang telah diberikan.

Proses pembuatan suatu informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dibutuhkan pemahaman dan kompetensi terhadap sistem akuntansinya karena laporan keuangan tersebut akan dibuat secara periodik. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang paham dan kompeten tentang sistem akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena

kompetensi sumber daya manusia yang memadai akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, masih banyak terdapat aparatur instansi pemerintah baik provinsi atau kabupaten/kota tidak sepenuhnya didasari dengan kompetensi yang dimiliki (<http://palembang.tribunnews.com/2017/06/28>). Bila hal ini terjadi maka aparatur- aparatur pemerintah sulit diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, efektif, dan efisien.

Selanjutnya dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai (Arfianti, 2011). Bentuk upaya dalam menyusun laporan keuangan yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu bentuk teknologi informasi ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan yang dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan tujuan agar dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini sangat membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi terkait dengan laporan keuangan yang disajikan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang tepat dan akurat.

Selain kompetensi aparatur pemerintah daerah dan teknologi informasi, faktor yang bisa mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, yaitu penatausahaan aset. Hal ini juga menjadi temuan Poae, *et. al.* (2017) jika secara parsial penatausahaan aset/BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam penatausahaan aset, kegiatan ini terdiri dari : pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang salah satu masalah utamanya, yaitu inventarisasi dan pengelolaan data aset/BMD. Penatausahaan aset ini akan menghasilkan sebuah laporan nilai aset tetap yang diperoleh dari bidang penatausahaan dan pemanfaatan aset.

Laporan nilai aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang kemudian akan disajikan pada LKPD Kota Palembang.

Oleh karena itu, penyusunan laporan nilai aset tetap harus tepat dan akurat sehingga kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dapat terwujud.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan, keterkaitan antara kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat pada saat aparatur menjalankan teknologi informasi didasarkan dengan kompeten yang baik karena dalam penggunaan aplikasi ini dilakukannya migrasi dan penginputan data secara cepat karena aplikasi BMD baru berjalan pada November 2016 yang kemudian informasi-informasi tersebut akan di tuangkan dalam sebuah laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir periode. Kemudian, untuk keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan penatausahaan aset tetap untuk melakukan tahap-tahap pembukuan, inventaris dan pelaporan telah didukung dengan aplikasi BMD sehingga lebih mudah untuk memverifikasi datanya sehingga informasi-informasi dalam laporan aset dapat sesuai/sepadan dengan laporan keuangan. Selanjutnya, keterkaitan antara kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan penatausahaan aset tetap pada saat melakukan kegiatan pembukuan, inventaris, dan pelaporan dibutuhkan dengan aparatur yang kompeten karena dalam melakukan kegiatan pembukuan dan pelaporan harus teliti dan rinci dalam proses pembuatannya sedangkan pada kegiatan inventaris terkadang aparatur harus terjun kelapangan untuk melihat barang-barang tersebut apakah memang benar adanya.

Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa untuk membuat suatu laporan keuangan agar mempunyai informasi keuangan yang berkualitas harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi/profesional, didukung oleh teknologi informasi yang memadai dan penatausahaan aset tetap dapat dikelola dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami. Laporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya akan di audit dan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) pada tabel 1.1 opini audit Kota Palembang tetap stabil dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan atas LKPD yang berhasil ditemukan pada Hasil Pemeriksaan Keuangan (HPK) BPK RI tahun 2016 yaitu pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Palembang belum dilaksanakan secara memadai berdasarkan pemeriksaan uji petik atas dokumen penatausahaan aset di BPKAD Kota Palembang. Hasil pemeriksaan ini mengungkapkan pengelolaan aset tetap (peralatan dan mesin) di pemerintah Kota Palembang mengalami perubahan sistem pengelolaannya. Sebelumnya pengelola aset tetap dilaksanakan secara manual berubah menjadi proses pencatatan dengan menggunakan aplikasi BMD yang mengakibatkan tidak terdapat verifikasi secara lengkap atas data yang diinput ke dalam aplikasi BMD. Selain itu, penyajian aset tetap yang memiliki nilai Rp0,00, dan masih terdapat aset dibawah nilai kapitalisasi yang disajikan sebagai aset tetap neraca (*intrakomptabel*). Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pengelolaan aset khususnya pada tahap penatausahaan aset tetap belum sesuai dengan Permendagri atau Peraturan Walikota yang mengatur mengenai hal ini dan bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (HPK BPK RI, 2016).

Tabel 1.1 menunjukkan daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Tahun 2012-2016).

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK di Kota Palembang

No	Keterangan	Opini
1	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : IHPS I Laporan Keuangan, 2017

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penatausahaan aset tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?
2. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?
4. Apakah penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis memfokuskan pembahasan pada kompetensi aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penatausahaan aset tetap dan kualitas informasi laporan keuangan daerah. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari Februari s/d Mei 2018. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan unit pengamatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang sebagai entitas pelaporan pemerintah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penatausahaan aset tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoristis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.
2. Manfaat Praktisi Bagi Instansi
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori berupa : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Penatausahaan Aset Tetap dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum terkait:

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Palembang

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.3 Deskripsi Responden

4.1.4 Statistik Deskriptif Variabel

4.1.5 Distribusi Jawaban Responden

4.1.5.1 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

4.1.5.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.1.5.3 Penatausahaan Aset Tetap

4.1.5.4 Kualitas Informasi Laporan Keuangan

4.1.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- Uji Validitas
- Uji Reliabilitas

4.1.7 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Heterokedastisitas

4.1.8 Hasil Uji Hipotesis

4.1.8.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

4.1.8.2 Hasil Uji t (Parsial)

4.1.8.3 Hasil Uji F (Simultan)

4.1.8.4 Hasil Koefisien Determinansi (*Adjusted R²*)

Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penatausahaan Aset Tetap secara parsial serta secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kota Palembang

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait serta keterbatasan dalam melaksanakan penelitian.